

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari 17.504 pulau dengan negara penduduk terpadat nomor empat di dunia. Diketahui jumlah penduduk Indonesia setara dengan 3,51% dari total penduduk dunia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merilis data kependudukan semester II tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, dari data tersebut diketahui jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 273.879.750 jiwa. Terdapat kenaikan sebanyak 2.529.851 jiwa dibanding tahun 2020. Dari kenaikan jumlah kepadatan penduduk setiap tahunnya membuat sumber daya manusia (SDM) juga semakin bertambah.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci dalam pembangunan suatu negara. Kualitas dari SDM perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan SDM merupakan keseluruhan pelaksanaan aktivitas maupun program yang bertujuan untuk pengembangan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Fungsi pada pengelolaan SDM harus dijalankan secara maksimal agar semua tujuan dari organisasi maupun individu dapat terpenuhi. Karena kemajuan ekonomi suatu negara tidak terlepas pula dari produktivitas SDM yang dimiliki (Alvianisari, 2017).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyebutkan bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Dari data BPS menunjukkan jumlah atau total penduduk di usia 15-19 berjumlah 22.200, dan usia 20-24 memiliki angka kelompok paling tinggi yaitu sebanyak 22.577,3. Generasi ini merupakan usia produktif yang diharapkan dapat menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan ekonomi.

Persentase jumlah penduduk produktif terus meningkat sebesar 66,09 % pada tahun 2010 meningkat menjadi 70,72 persen populasi penduduk di tahun 2020 (Administrator, 2021). Semakin banyak penduduk usia produktif maka akan semakin banyak tenaga kerja dan angkatan kerja. Jumlah penduduk yang besar di suatu negara masih dianggap oleh sebagian ahli ekonomi sebagai penghambat pembangunan. Salah satunya pendapat dari Mulyadi dalam Azulaidin (2021) yang menyatakan bahwa tingginya angka pertumbuhan penduduk yang terjadi di negara yang sedang berkembang dapat menghambat proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar mengakibatkan angkatan kerja semakin banyak. Artinya semakin banyak orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Dalam pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan tidak sebanding dengan tingkat pengangguran yang ada menyebabkan semakin banyak orang yang menganggur termasuk penduduk produktif.

Pengangguran merupakan masalah terbesar yang dihadapi setiap negara, yang tidak lagi asing terdengar di setiap daerah, baik dalam tingkat pusat provinsi, maupun kabupaten/kota. Berdasarkan data dari BPS Republik Indonesia, (2021) menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar

6,49 %, ini mengalami penurunan sebesar 0,35 % poin dibandingkan Agustus 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 0,70 % poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Pada Agustus 2021, TPT laki-laki sebesar 6,74 %, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,11%. TPT laki-laki mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020 dan Februari 2021, masing-masing sebesar 0,72 persen poin dan 0,07 persen poin. Sementara TPT perempuan mengalami penurunann sebesar 0,35 persen poin dibandingkan Agustus 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen poin dibandingkan Februari 2021.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (8,32 %) lebih tinggi hampir dua kali lipat TPT di daerah pedesaan (4,17 %). TPT menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan TPT nasional, yaitu turun dibandingkan Agustus 2020 dan naik dibandingkan Februari 2021. Dibandingkan Agustus 2020, TPT perkotaan dan pedesaan turun masing-masing sebesar 0,66 persen poin dan 0,54 persen poin. Namun jika dibandingkan Februari 2021, TPT perkotaan dan pedesaan naik masing-masing sebesar 0,32 persen poin dan 0,06 persen poin.

Tabel 1.1
Karakteristik Pengangguran (persen), Agustus 2020-Agustus 2021

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021	Perubahan Ags 2020-Ags 2021	Perubahan Feb 2021-Ags 2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,07	6,26	6,49	-0,58	0,23
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	7,46	6,81	6,74	-0,72	-0,07
- Perempuan	6,46	5,41	6,11	-0,35	0,70
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	8,98	8,00	8,32	-0,66	0,32
- Pedesaan	4,71	4,11	4,17	-0,54	0,06
TPT Menurut Kelompok Umur					

- 15-24 tahun	24,46	18,03	19,55	-0,91	1,52
- 25-59 tahun	5,04	4,57	4,44	-0,60	-0,13
- 60 tahun ke atas	1,70	1,29	2,73	1,03	1,44

Sumber : BPS Republik Indonesia (2021) dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan suatu usaha, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan karena dianggap tidak mungkin untuk mendapatkannya, dan orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, baik mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan dan mereka yang sedang bersekolah. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang memasuki usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai 65 tahun (Disnaker, 2019). Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun sampai 65 tahun yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data BPS Republik Indonesia tahun 2021 memaparkan data terkait jumlah penduduk usia kerja dan jumlah angkatan kerja khususnya di Pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan dua wilayah khusus yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.2
 Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) Menurut Provinsi
 Tahun 2021 di Pulau Jawa

Provinsi	2021 Februari							
	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK
DKI Jakarta	4.909.174	456.600	5.365.774	91,49	732.471	1.723.507	418.074	2.874.052
Jawa Barat	22.311.685	2.185.465	24.497.150	91,08	2.838.508	8.301.487	2.147.189	13.287.184
Jawa Tengah	17.701.854	1.122.663	18.824.517	94,04	1.836.911	4.952.028	1.517.587	8.306.526
DIY	2.201.508	98.399	2.299.907	95,72	273.238	456.968	128.539	858.745
Jawa Timur	21.030.711	1.147.061	22.177.772	94,83	2.079.158	6.009.817	1.528.726	9.617.701
Banten	5.686.915	563.402	6.250.317	90,99	721.683	2.072.640	679.188	3.473.511
Total	131.064.305	8.746.008	139.810.313	93,74	15.271.168	39.848.534	10.430.421	65.550.123

Sumber : BPS Republik Indonesia (2021), dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Dari tabel Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) BPS Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di pulau jawa yang memiliki angka pengangguran tertinggi yaitu 1.147.061 juta jiwa. Dalam angka Angkatan Kerja provinsi Jawa Timur juga merupakan Provinsi tertinggi dengan jumlah 22.177.772 juta jiwa setelah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi penopang kekuatan ekonomi di Indonesia karena aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur menyumbang sekitar 15% produk domestik bruto nasional, nomor dua setelah DKI Jakarta (Purwanto, 2020).

Secara Administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi Interim sensus penduduk berjumlah sekitar 40,666 juta jiwa. Kepadatan penduduk per km² sebesar

855 jiwa/km². Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur pada 2020 mengalami kenaikan. Menurut BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari dan Agustus, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu pada bulan Februari sebesar 5,17 % dan pada bulan Agustus yaitu sebesar 5,74 %. Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari Kepala BPS Jawa Timur yang mengatakan di dalam berita bahwa:

“SURABAYA – Badan Pusat Statistik(BPS) menyebutkan jika TPT di Jawa Timur per Agustus 2021 sebesar 5,74% atau turun 0,1 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Namun, jumlah itu naik 0,57 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

“Hingga Agustus 2021, sebanyak 1,28 juta orang di Jatim berstatus pengangguran. Jika dibanding dengan Februari 2021, jumlah pengangguran itu bertambah 134.330 orang,” ujar Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan, Senin (8/11).

Dadang menambahkan, untuk jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 22,32 juta orang, bertambah 55,03 ribu orang dibanding Agustus 2020 dan bertambah 141,37 orang dibanding Februari 2021.

Sumber:<https://www.google.com/amp/s/radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/09/11/2021/tingkat-pengangguran-terbuka-di-jatim-tembus-128-juta-orang/amp/>, diakses pada 05 April 2022).

Berikut ini adalah tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/ Kota, 2019–2021 :

Tabel 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/ Kota, 2019–2021

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	TPT/ <i>R</i>			TPAK/ <i>LFPR</i>		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/ Regency						
Pacitan	0,91	2,28	2,04	79,62	80,36	80,57
Ponorogo	3,50	4,45	4,38	71,15	71,51	72,63
Trenggalek	3,36	4,11	3,53	73,45	75,72	72,36
Tulungagung	3,29	4,61	4,91	70,48	73,17	72,26
Blitar	3,05	3,82	3,66	72,93	70,83	70,44
Kediri	3,58	5,24	5,15	71,76	70,65	69,34
Malang	3,70	5,49	5,40	70,07	71,62	68,49
Lumajang	2,73	3,36	3,51	66,14	66,92	66,19

Jember	3,69	5,12	5,44	67,16	68,04	68,97
Banyuwangi	3,95	5,34	5,42	72,13	71,80	72,32
Bondowoso	2,86	4,13	4,46	76,01	75,09	73,89
Situbondo	2,77	3,85	3,68	72,40	73,17	71,63
Probolinggo	3,77	4,86	4,55	68,88	72,89	73,24
Pasuruan	5,22	6,24	6,03	68,82	67,67	69,03
Sidoarjo	4,62	10,97	10,87	66,98	67,17	66,47
Mojokerto	3,61	5,75	5,54	69,46	69,79	70,47
Jombang	4,28	7,48	7,09	71,04	70,23	70,69
Nganjuk	3,16	4,80	4,98	66,78	65,75	64,24
Madiun	3,52	4,80	4,99	70,47	71,42	67,77
Magetan	2,98	3,74	3,86	72,34	73,23	73,31
Ngawi	3,60	5,44	4,25	72,48	72,69	72,88
Bojonegoro	3,56	4,92	4,82	71,29	74,60	71,84
Tuban	2,70	4,81	4,68	68,76	71,84	73,77
Lamongan	3,89	5,13	4,90	68,96	70,81	70,72
Gresik	5,40	8,21	8,00	65,83	66,53	69,43
Bangkalan	5,62	8,77	8,07	63,44	67,00	68,66
Sampang	2,71	3,35	3,45	66,74	69,93	70,19
Pamekasan	2,26	3,49	3,10	68,50	69,82	65,88
Sumenep	2,08	2,84	2,31	75,33	75,02	75,63
Kota/ Municipality						
Kediri	4,15	6,12	6,37	64,81	66,00	67,35
Blitar	4,54	6,68	6,61	72,15	69,53	69,96
Malang	5,88	9,61	9,65	66,10	66,41	67,59
Probolinggo	4,25	6,70	6,55	64,12	69,07	69,71
Pasuruan	4,89	6,33	6,23	68,12	70,05	71,66
Mojokerto	2,63	6,74	6,87	65,09	68,21	67,09
Madiun	3,96	8,32	8,15	66,86	68,63	66,87
Surabaya	5,76	9,79	9,68	68,76	68,05	67,30
Batu	2,42	5,93	6,57	71,22	72,33	73,74
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	69,61	70,33	70,00

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa yang mengalami Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling tinggi di provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 terdapat di wilayah Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 10,87%. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work From Home* (WFH), hal ini dapat mempengaruhi produktivitas, kondisi keuangan atau kinerja perusahaan dan mempersulit perusahaan untuk membebaskan kewajiban kepada pemberi kerja mengenai hak pengaturan karyawan,

termasuk gaji. Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari Wakil Bupati Sidoarjo yang mengatakan di dalam berita bahwa:

SIDOARJO – Angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo mencapai yang tertinggi di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan pindah tempat produksi.

Wakil Bupati Sidoarjo, H.Subandi. Ia mengungkapkan bahwa angka pengangguran mencapai 10,87 persen dan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.

Sumber:(<https://www.suarajatimpost.com/news/angka-pengangguran-di-sidoarjo-tertinggi-di-jawa-timur/>, Diakses pada rabu 06 April 2022)

Pengangguran terbuka terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat (Jundi, 2014). Angka pengangguran merupakan masalah yang harus cepat ditanggulangi oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja yang berperan penting dalam hal ketenagakerjaan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah daerah berupaya untuk menekan angka pengangguran yang terus meningkat. Terobosan-terobosan strategis memang dirasa perlu untuk menekan angka tersebut. Pemerintah terus berupaya untuk membuka lowongan pekerjaan di berbagai sektor. Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan, semua orang memiliki kesempatan yang sama dan diharapkan dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor. Perlunya perluasan kesempatan kerja dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya dan program yang diharapkan akan mengurangi angka

pengangguran yang ada di Kabupaten Sidoarjo agar para pengangguran mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan keterampilannya. Dinas tenaga kerja telah merancang program dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Program tersebut adalah meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 17 bahwa seksi perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja mempunyai tugas :

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja;
- c. Menyusun dan memperbarui data perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Masalah ketenagakerjaan adalah tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, tugas pokok dinas ini adalah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja selain itu juga bertugas menyusun dan memiliki kebijakan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja. Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja sering kali tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja. Hal ini karena program perluasan kesempatan kerja yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja masih bersifat umum, sedangkan pencari kerja mempunyai ciri yang spesifik. Program perluasan kesempatan kerja dibuat hanya berdasarkan sisi persediaan dan

kurang memperhatikan dari sisi permintaan. Akibatnya, banyak program perluasan kesempatan kerja yang kurang tepat sasaran ketika dipraktikkan di lapangan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan pendapat David (2019) tentang manajemen strategi pada tahapan implementasi strategi. Dimana penerapan suatu strategi akan bergantung pada keputusan dari pihak yang berwenang dalam menetapkan sebuah keputusan tentang tujuan berjangka dan alokasi sumber daya. Akan tetapi, pada alokasi sumber daya diketahui berdasarkan hal tersebut diatas kinerja program berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia secara kuantitas belum cukup memadai mengingat tidak banyak menyerap tenaga kerja dan kadang kurang tepat sasaran. Selain itu data pencari kerja di Kabupaten Sidoarjo juga lebih banyak dibandingkan data penempatannya, bisa dilihat dari tabel 1.5 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Pencari Kerja, Penempatan dan Penghapusan Pencari Kerja Menurut Bulan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Bulan	Pencari Kerja	Penempatan	Penghapusan Pencari Kerja
Januari	75	-	-
Februari	16	-	-
Maret	13	-	-
April	6	-	-
Mei	4	-	-
Juni	1.460	1.442	-
Juli	9	-	-
Agustus	5	-	-
September	1	-	-
Oktober	13	-	-
November	4.055	-	-
Desember	19	352	1.794
Kabupaten Sidoarjo	5.676	1.794	1.794

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021

Selain itu juga dalam program perluasan kesempatan kerja memiliki kelemahan yaitu program ini bersifat sementara, dan terkesan program ini hanya merupakan program populis yang dapat memberikan kesan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan pekerjaan kepada warganya meski hanya sementara. Pemerintah tidak terlalu memperhitungkan berapa tenaga kerja yang dapat terserap dalam program perluasan kesempatan kerja ini. Hal ini tidak sesuai dengan teori manajemen strategi dari David (2019) pada tahapan evaluasi strategi, dimana fungsi pokok agar manajer dapat mengetahui informasi tentang keberhasilan strategi dan mengukur kinerja yang telah dilaksanakan.

Melihat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja perlu adanya usaha dari pemerintah daerah untuk menyusun strategi dalam menyediakan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang produktif, ini diberikan kepada semua yang membutuhkan, dan diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo.

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan peneliti yaitu milik Butar (2015) yang berjudul Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan obyek penelitian yang serupa yaitu strategi Dinas Tenaga Kerja. Namun, memiliki lokus yang berbeda yaitu di Kota Pekanbaru, serta tahun yang berbeda. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dilihat dari semua indikator yang telah disajikan, dapat dikatakan bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota

Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang masih belum bisa berjalan dengan baik berupa rendahnya minat mengisi lowongan pekerjaan diluar daerah, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tidak mempunyai keahlian dan keterampilan serta masuknya penduduk luar untuk mencari pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sumber daya manusia dan komunikasi.

Berdasarkan deskripsi permasalahan sebagaimana sudah dijelaskan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sidoarjo melalui analisis teori manajemen strategi dari Fred R. David (2019). Manajemen strategi adalah perumusan, pengaplikasian, dan evaluasi dari berbagai keputusan yang memungkinkan organisasi untuk dapat mencapai tujuannya. Tujuan Manajemen Strategi adalah memanfaatkan dan membuat kesempatan/oportunitas baru dan berbeda untuk masa depan. Menurut David (2019) manajemen strategi terdiri dari 3 tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategy, dan evaluasi strategi.

Dalam kajian ini yang akan dibahas oleh peneliti adalah perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul **“Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu "Bagaimana Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sidoarjo".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
 - a) Dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang strategi Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sidoarjo.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa lainnya yang mau melakukan penelitian sejenis. Mahasiswa lainnya juga diharap dapat memahami strategi Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui penelitian ini.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi dan literatur pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang akan dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta sebagai penunjang pendidikan dan bahan pembanding bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

3. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo terkait strategi Dinas Tenaga Kerja dalam meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam menganalisis sejauh mana pencapaian program serta sebagai bahan evaluasi kedepannya dalam perbaikan pelaksanaan program.